

KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM MITIGASI BENCANA KEBAKARAN HUTAN DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI

Muhammad Fiqra¹, Yessy Novella^{2*}

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat¹, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor²

muhammad.fiqra1508@gmail.com¹, yessin2219@ipdn.ac.id²,

Received: 23-02-2023, Accepted: 04-10-2023; Published Online: 30-10-2023

*Corresponding author

ABSTRAK

Penulis berfokus pada permasalahan dimana bencana merupakan hal yang tidak dapat diprediksi namun masih bisa dicegah dan antisipasi terutama bencana kebakaran hutan yang telah menjelma sebagai agenda tahunan saat musim kemarau, karena itu diperlukan dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk mencegah bencana kebakaran hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui kinerja dan faktor-faktor penghambat kinerja BPBD serta mengetahui upayanya dalam menangani faktor penghambat pelaksanaan mitigasi bencana kebakaran hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Metode dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap teori kinerja dari Agus Dwiyanto pengumpulan data dengan wawancara mendalam (17 informan), dokumentasi serta observasi. Sarana dan prasarana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat bisa dikatakan masih minim. Hal ini dilihat dari terhambatnya BPBD dalam mengakses lokasi bencana kebakaran hutan. Tidak hanya itu, sarana dan prasarana yang digunakan dalam mitigasi bencana jumlahnya masih sedikit. Bahwa kinerja BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara umum sudah baik dan terus melakukan perkembangan terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penulis memberikankritik dan saran untuk BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat agar terus berbenah kearah lebih baik lagi untuk menjawab tuntutan masyarakat.

Kata Kunci: Bencana; BPBD; Kebakaran Hutan; Kinerja;

ABSTRACT

The author focuses on problems where disasters are unpredictable but can still be prevented and anticipated, especially forest fire disasters which have become an annual agenda during the dry season, therefore support from the government and the community is needed to prevent forest fire disasters in West Tanjung Jabung Regency. The purpose of this study was to determine the performance and inhibiting factors of BPBD performance and to find out the BPBD efforts of West Tanjung Jabung Regency in dealing with the inhibiting factors in the implementation of forest fire disaster mitigation in West Tanjung Jabung Regency, Jambi Province. This study used a descriptive qualitative method with an inductive approach and analysis of performance theory from Agus Dwiyanto. Data collection techniques used in-

depth interviews (17 informants), documentation and observation. The facilities and infrastructure owned by the Regional Disaster Management Agency for West Tanjung Jabung Regency are still lacking. This can be seen from the obstruction of the BPBD in accessing forest fire disaster locations. In addition, the number of facilities and infrastructure used in disaster mitigation is still small. That the performance of the West Tanjung Jabung Regency BPBD in general has been good and continues to make progress towards improving services to the community. The author provides criticism and suggestions for the West Tanjung Jabung Regency Regional Disaster Management Agency so that it continues to improve in a better direction to answer the demands of the community.

Keywords: Disaster;BPBD;Forest Fire;Performance

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi negara dengan tingkat rawan bencana alam yang besar. Hal tersebut di latar belakang dengan kekayaan hutan yang luas, khususnya bencana kebakaran hutan yang awalnya dianggap biasa namun lama kelamaan menjadi sebuah bencana bagi negara Indonesia. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab akan hal ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945, dijelaskan bahwasannya pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Perlindungan tersebut dapat diartikan juga perlindungan terhadap bencana oleh pemerintah kepada warga negaranya. Penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Prabencana dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Fokus penelitian ini penulis mengambil pada klasifikasi prabencana dalam proses mitigasi bencana kebakaran hutan. Upaya dalam mitigasi itu sendiri menyusun strategi-strategi daerah yang bertujuan untuk mitigasi bencana yang disesuaikan dengan kondisi geografis daerah mitigasi tersebut, disesuaikan dengan peraturan yang telah disahkan. Utamanya pada musim kemarau bencana kebakaran hutan dan lahan menjadi bencana yang sering terjadi di tiap tahunnya.

Faktor utama yang menjadi penyebabnya adalah aktifitas manusia dalam upaya pembukaan dan pengolahan lahan dengan cara membakar inilah yang sering menjadi titik awal merambatnya api sehingga menimbulkan gangguan di berbagai sektor yang disebabkan pengaruh asap hasil pembakaran. Dari 9 (sembilan) kabupaten yang terdapat pada Provinsi Jambi. Pada tahun 2020/2021 Kabupaten Tanjung Jabung Barat menjadi kabupaten yang memiliki titik panas rawan bencana kebakaran hutan tertinggi di Provinsi Jambi. Menurut grafik *hotspot* Provinsi Jambi pada periode 1 Januari sampai 18 Juli tahun 2021 kemarin menunjukkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki grafik *hotspot* tertinggi di provinsi Jambi yaitu sejumlah 135 titik api. Sebagian besar wilayah hutan yang diisi dengan

hutan gambut membuat Kabupaten Tanjung Jabung Barat mudah sekali bermunculan titik *hotspot*, terlebih lagi pada saat musim kemarau.

Luas wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu sebesar 5.009,82 km, dengan pembagian wilayah sebanyak 13 kecamatan. Secara geografis Kabupaten Tanjung Jabung Barat ialah 0°53-01°41 LS dan antara 101°23- 104° 21 BT. Adapun batas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbatasan langsung dengan Provinsi Riau disebelah utara, selatan dengan Kabupaten Batang Hari, sebelah barat dengan Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tebo, sebelah timur dengan selat berhaladan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Beberapa bencana tercatat pernah terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat antara lain banjir, cuaca ekstrim/gelombang ekstrim serta abrasi, kebakaran gedung, pemukiman serta kebakaran hutan dan lahan. Seringnya bencana–bencana tersebut terjadi menyebabkan perlu adanya peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana. Untuk menangani hal tersebut kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jambi dianggap penting untuk dievaluasi, bukan hanya pada tingkat Provinsi saja akan tetapi disetiap Kabupaten dianggap juga perlu dibentuk guna mengoptimalkan peran dari BPBD itu sendiri, sehingga lebih cepat tanggap akan segala hal yang bersangkutan dengan kewenangan BPBD tersebut. BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penanggulangan, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2009 mengenai Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelatihan Penanggulangan Bencana, yang fokus utamanya dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan serta pengendalian pelatihan.

TINJAUAN TEORI

1. Kinerja

Menurut (Dwiyanto 1995) dalam Manajemen Kinerja (Dwiyanto, 2002) mengemukakan 5 (lima) parameter untuk mengukur kinerja organisasi, diantaranya:

1. Produktivitas

Dengan mengukur tingkat efisiensi, efektivitas pelayanan publik dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan.

2. Kualitas Layanan

Dengan mengukur kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

3. Responsivitas

Dengan mengukur kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta meningkatkan program pelayanan

publik yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

4. **Responsibilitas**

Menjelaskan/mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip administrasi yang sesuai dengan kebijakan organisasi.

5. **Akuntabilitas**

Seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat atau ukuran yang menunjukkan penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki para stakeholders.

Kinerja BPBD yang baik maka berarti pelayanan yang dilaksanakan BPBD itu sendiri juga prima, karena masyarakat yang secara langsung merasakan dampak dari kinerjanya yang positif, akan tetapi kinerja BPBD yang baik harus juga diberikan apresiasi agar semakin baik lagi tiap tahunnya.

2. Bencana

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana ialah suatu peristiwa yang mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan, faktor alam, non alam, maupun manusia yang dapat berakibat pada timbulnya sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, rusaknya lingkungan, kehilangan harta benda serta terganggunya psikologis. Pengertian bencana dalam Kepmen Nomor 17/kep/Menko/Kesra/x/95 adalah suatu peristiwa yang terjadi disebabkan alam, manusia, atau bahkan keduanya yang berakibat pada timbulnya korban jiwa, hilangnya harta benda, rusaknya lingkungan, rusaknya sarana prasarana dan fasilitas umum serta terganggunya kehidupan manusia.

Sedangkan definisi bencana menurut WHO adalah setiap fenomena yang mengakibatkan kerusakan, terganggunya ekologis, hilangnya nyawa manusia, bahkan menurunnya tingkat kesehatan dan pelayanan yang memerlukan respon dari masyarakat lain yang tidak terkena bencana. Setelah dijabarkan sebagaimana diatas, dapat ditarik garis besar jika bencana merupakan gangguan serius bagi masyarakat, yang bisa merugikan masyarakat, dan dampak yang ditimbulkan melebihi kesanggupan manusia dalam mengatasinya dengan sumber daya yang tersisa.

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai penanggulangan bencana, terdapat beberapa macam bencana diantaranya:

- a. **Bencana alam** yaitu bencana yang terjadinya disebabkan oleh alam, misalnya tanah

longsor, gempa bumi, angin topan, gunung meletus, banjir, kekeringan, tsunami.

- b. Bencana non alam yaitu suatu bencana yang penyebabnya ialah non alam contohnya gagal teknologi, gagal modernisasi, dan wabah penyakit.
- c. Bencana sosial ialah bencana yang terjadi akibat dari ulah manusia contohnya yaitu konflik antar kelompok ataupun antar komunitas.
- d. Kegagalan Teknologi ialah bencana yang terjadinya karena kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian dan kesengajaan manusia dalam menggunakan teknologi ataupun industri sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran, korban jiwa, rusaknya bangunan, serta kerusakan-kerusakan lain.

Bencana bisa disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor pertama ialah faktor alam (*natural disaster*), penyebabnya alam sendiri tidak ada campur tangan manusia. Kedua yaitu faktor non-alam (*non-natural disaster*), tidak disebabkan oleh alam maupun manusia, yang terakhir ialah faktor social (*man-made disaster*) penyebabnya adalah karena tindakan manusia, contohnya konflik horizontal, konflik vertical, dan terorisme.

Bencana merupakan hal yang menjadi dasar dibentuknya BPBD oleh karena itu BPBD pasti paham betul akan bencana dan perlu persiapan yang matang dalam menghadapinya, oleh karena itu perlu strategi yang matang dan telah dituangkan dalam rencana strategis dan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana baik alam ataupun non alam maka BPBD siap menghadapinya. Dan kinerja BPBD akan baik apabila ditunjang dengan skill, pengetahuan, dan sarana yang memadai akan bencana tersebut, sehingga kinerja BPBD yang baik akan mendapatkan apresiasi tersendiri dari masyarakat.

3. Badan Penanggulangan Bencana

Menurut Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 mengenai Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang kemudian dikenal dengan BNPB ialah Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang berada dibawah presiden dan bertanggungjawab langsung kepada presiden yang pembentukannya difungsikan untuk menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang dikenal dengan BPBD ialah perangkat daerah yang didirikan dengan tugas dan fungsi menaggulangi bencana di daerah. BPBD merupakan wadah dari aspirasi masyarakat akan perlu hadirnya pemerintah didalam masyarakat dalam lingkup terjadinya bencana, sehingga pemerintah menggunakan BPBD untuk menjadi

penyalur bantuan ataupun kebijakan dari pemerintah sehingga masyarakat merasa pemerintah hadir dan memiliki peran atau andil apabila tiba-tiba terjadi suatu bencana.

Adapun jumlah anggota BPBD Kabupaten/Kota berjumlah 9 (sembilan) anggota, yang terdiri dari 5 anggota dari instansi pemerintah daerah dan 4 anggota lain dari masyarakat daerah yang profesional. BPBD tidak semerta-merta bisa melaksanakan kebijakannya tanpa bantuan dan dukungan penuh dari masyarakat sebagai elemen penting yang bisa membantu kapanpun dalam penanggulangan terjadinya suatu bencana, karena BPBD terdiri dari elemen masyarakat, dan mendapat bantuan oleh masyarakat, dan bekerja penuh untuk kepentingan masyarakat.

4. Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan

Dalam mitigasi dilakukan upaya – upaya untuk meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat ataupun komunitas yang dilaksanakan dengan merencanakan tata guna lahan, menyusun peta kerentanan bencana, menyusun database, pemantauan serta pengembangan (Noor D, 2014:6).

Mitigasi memiliki tujuan utama, yaitu :

1. Meminimalkan dampak bencana yang muncul khususnya untuk penduduk contoh kematian, kerugian ekonomi, serta kerusakan sumber daya alam.
2. Menjadi acuan untuk merencanakan pembangunan.
3. Menyisakan pengetahuan bagi masyarakat dalam menghadapi dan meminimalkan risiko yang terjadi, dengan demikian masyarakat bisa hidup serta bekerja secara aman.

Kebakaran hutan atau lahan ialah perubahan fisik dan atau hayati hutan baik secara langsung ataupun tidak langsung sehingga mengurangi fungsi hutan atau lahan dalam menunjang kehidupan yang berkelanjutan karena akibat dari penggunaan api yang tidak bertanggungjawab atau karena faktor alam. Kebakaran hutan dapat terjadi disebabkan karena :

1. Kegiatan manusia yang menggunakan api di sekitar hutan atau lahan yang bisa saja berakibat pada terjadinya kebakaran.
2. Faktor alam yang bisa menjadi pemicu kebakaran hutan dan lahan.
3. Tanaman yang sejenis dan mempunyai titik bakar rendah serta hutan yang terdegradasi mengakibatkan semakin bertambahnya kerentanan terjadinya bencana kebakaran.
4. Bertiupnya angin yang cukup besar bisa menjadi pemicu api semakin cepat menjalar.

5. Topografi yang terjal membuat api semakin cepat menrembet dari bawah ke atas.
6. Kesengajaan manusia melakukan pembakaran untuk menyiapkan lahan. Selain itu kebakaran juga bisa terjadi dikarenakan kelalaian dan faktor alam.
7. terjadinya kebakaran disebabkan adanya bahan bakar, oksigen dan panas.

Mitigasi bencana kebakaran hutan ialah upaya-upaya guna mengurangi resiko kebakaran hutan, dengan cara melakukan pembangunan fisik, membangun kesadaran manusia atau peningkatan pengetahuan menghadapi ancaman bencana kebakaran hutan tersebut. Mitigasi bencana kebakaran hutan inilah yang nantinya akan digunakan dalam hal mengatasi agar penyebab kebakaran hutan dapat dicegah atau dihindarkan.

METODOLOGI

1. Pendekatan Penelitian

Metode dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dikarenakan pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diharapkan bisa menjabarkan hal-hal yang ada kaitannya dengan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi ini.

Berdasarkan pendapat ahli, tujuan penulis menerapkan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu mampu menjelaskan secara keseluruhan masalah yang akan diamati dan diteliti serta mampu mengelola dan menganalisis hasil penelitian yang dipergunakan dalam menjawab pertanyaan sesuai dengan rumusan masalah yang teridentifikasi.

2. Sumber Data

Sugiyono (2013:220) menjelaskan data yaitu kumpulan datum dari sekian banyak fakta empirik yang penulis kumpulkan untuk memecahkan permasalahan penelitian. Untuk memudahkan identifikasi data berdasarkan sumbernya bisa dikelompokkan ke dalam 2 jenis :

1. Data Primer, yaitu data asli atau data baru yang secara langsung dikumpulkan oleh peneliti sendiri.
2. Data Sekunder, yaitu data yang telah ada atau tersedia yang kemudian peneliti mengumpulkannya dari sumber-sumber yang ada. Misalnya dari perpustakaan, dokumen penelitian terdahulu.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kedua sumber data di atas baik sumber data primer maupun sumber data sekunder.

3. Informan

Dalam penelitian ini, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi serta wawancara terhadap orang-orang yang menurut peneliti mengetahui situasi sosial tersebut. Dalam menentukan orang yang akan di wawancarai peneliti melakukannya secara purposive. Sugiyono berpendapat (2013:85) *Purposive Sampling* ialah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan kriteria yang diinginkan sehingga dapat ditentukan jumlah sampel yang akan diteliti.

Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 17 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kepala Bidang Kesiapsiagaan, Sarana dan Prasarana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kepala Bidang Bencana dan Rehabilitasi, Kepala Sub Bagian Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Kepala Sub Bagian Perencanaan BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Staf BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Masyarakat (sebanyak 10 orang).

4. Teknik Pengumpulan Data

Simangunsong (2017:230) menuliskan data ialah kumpulan datum dari banyaknya fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti dengan tujuan untuk menjawab permasalahan penelitian. Untuk mencapai data yang signifikan dan berkesinambungan guna mendapatkan pemecahan masalah dalam penelitian magang riset terapan pemerintahan ini, dalam pengumpulan datanya penulis menggunakan tiga teknik yakni wawancara, dokumentasi, dan observasi.

5. Teknik Analisis Data

Dalam Sugiyono, Miles and Huberman (2013:246) memberi pendapat bahwasanya kegiatan pada analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan substansi secara terus menerus hingga tuntas. Maka dari itu hal ini akan memudahkan penulis dalam menganalisis data dan manfaat guna memperoleh tujuan akhir penelitian. Berikut ini pengkajian data yang dikembangkan Miles dan Huberman (2013:247) :

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lokasi penelitian harus dituliskan secara rinci dan cermat, sehingga semakin lama peneliti ikut serta secara langsung ke lokasi observasi maka banyak pula informasi yang didapat peneliti maka data akan berhimpun dan bertautan.

b. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, penulis selanjutnya membuat display data agar mempermudah guna menginterpretasikan gambaran kejadian.

c. Penarikan Kesimpulan

Dalam Sugiyono (2013:252) Miles dan Huberman berpendapat tahap ketiga pada analisis data kualitatif ialah menarik pemahaman dan validasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

Penulis menganalisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi menggunakan teori dari Agus Dwiyanto. Teori tersebut mempunyai 5 parameter dalam mengukur kinerja yakni Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas serta Akuntabilitas. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut:

1. Produktivitas

Kinerja dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat harus memberikan pelayanan dengan hasil yang memuaskan dengan mengukur produktivitas kinerja OPD tersebut. Produktivitas akan mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pelayanan. Seperti yang dikatakan Kepala BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bapak Drs. Zulfikri, M.AP. bahwa, “ketika BPBD telah melakukan penertiban dan pemberitahuan terkait kebakaran hutan, masyarakat akan mengulangi hal tersebut, seperti itu akan terjadi terus apabila tidak ada kesadaran dari masyarakat sendiri”. Hasil Efisiensi pelayanan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sampai sekarang dapat dikatakan sudah baik akan tetapi belum optimal sebab masih ada kendala-kendala dalam pencapaian kinerja BPBD.

Produktivitas dengan mengukur tingkat Efektivitas pelayanan publik, dalam rangka mencapuntuk memperoleh hasil yang diinginkan. Berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bapak Drs. Zulfikri, M.AP pada hari Kamis, 06 Januari 2022, mengatakan bahwa, “Dalam penanggulangan bencana oleh BPBD diperlukan pedoman struktur organisasi serta mekanisme kerja yang jelas, namun dalam pelaksanaan penanggulangan bencana BPBD tidak bisa melakukannya sendiri, oleh karena itu diperlukan adanya pihak lain yang turut serta membantu sehingga dalam proses pelaksanaan dapat berjalan dengan maksimal, efektif dan efisien”.

Selaras dengan fungsi pemerintahan sebagai pelayan masyarakat apakah pemerintah sudah efektif dalam memberikan pelayanan. minimnya jumlah anggota yang bertugas berpengaruh kepada keefektivan pelaksanaan tugas dalam mitigasi bencana Kebakaran Hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Maka dari itu, menindak lanjuti hal ini upaya yang dilakukan yaitu dengan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk dapat bersama-

sama ikut serta dalam penanggulangan bencana.

2. Kualitas Layanan

Kualitas layanan dapat diartikan bagaimana BPBD dalam menjalankan perannya sebagaimana tugas dan tanggung jawab yang dimiliki apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang ada ataukah masih perlu ada peningkatan. Dalam mengukur kualitas layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat penulis mengambil 2 (dua) indikator keberhasilan, yaitu kemudahan & kejelasan informasi yang diberikan dan kepuasan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan tim gabungan karhutla Bapak Kasi ops dari unsur TNI pada 06 Januari 2022 mengatakan bahwa, “Kami dengan BPBD berperan aktif & signifikan dalam mitigasi bencana kebakaran hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini. Kami terus menerus memberikan sosialisasi serta penyuluhan untuk masyarakat tentang pencegahan & bahaya dari kebakaran hutan. Bentuk pencegahan yang kita sosialisasikan sekaligus kita ajarkan kepada masyarakat salah satunya ialah dengan kita mengajarkan masyarakat bagaimana cara membuat embung air dan penggalian saluran parit dalam mencari cadangan sumber air ditengah tengahlahan gambut. Hal ini dilakukan guna ketika musim kemarau terjadi masih terdapat cadangan sumber air yang bisa digunakan sewaktu-waktu ada pantauan titik hotspot terdeteksi”

Menguatkan hasil penelitian Penulis melakukan wawancara dengan Kepala Sub Bagian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bapak Syaiful Anwar, SH. Pada 11 Januari 2022, Beliau mengatakan bahwa, “untuk mengurangi resiko terjadinya kebakaran hutan yang pertama kali team kita lakukan ialah sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan membakar. Yang kedua kita mengedukasi masyarakat mengenai bahaya mengenai ketika masyarakat membakar lahan ketika ingin membuka lahan perkebunan. Kemudian kita juga mengukasi masyarakat tentang teknologi tepatguna tentang bagaimana cara membuka lahan perkebunan dengan cara tidak membakar”.

Untuk mengetahui kepuasan Masyarakat maka Penulis mewawancarai salah satu masyarakat yang bersangkutan pada hari Selasa, 11 Januari 2022 pukul 09.30 WIB. Beliau mengatakan bahwa, “Banyaknya manfaat yang kami rasakan karena BPBD selalu siap sedia dalam menanggapi bencana kebakaran hutan yang terjadi, tidak mengenal waktu dan tempat BPBD selalu siap apabila ada laporan dari perusahaan atau dari masyarakat mengenai bencana yang terjadi. Terkhusus pada bencana Kebakaran Hutan BPBD juga memberikan pelayanan seperti sosialisasi pencegahan dan penanganan yang harus dilakukan oleh kami masyarakat agar terhindar dari bahaya Kebakaran Hutan”.

Berdasarkan wawancara dengan masyarakat diatas penulis menyimpulkan bahwa BPBD dalam memberikan pelayanan sudah maksimal sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi BPBD sebagaimana tertulis di pengaturannya. Penulis menemukan bahwa kesiapan dalam menghadapi bencana ditandai dengan petugas selalu siap sedia kapanpun dan dimanapun

supaya semuanya bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan masyarakat.

3. Resposivitas

Yaitu mengukur kemampuan organisasi untuk mengenali apa saja yang dibutuhkan masyarakat, melakukan penyusunan agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program pelayanan publik sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dalam hal ini BPBD telah melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana ini menyebutkan bahwa pada Pasal 21 salah satu tugas dari Badan Penanggulangan Bencana ialah sebagai penyusun dan menetapkan prosedur daya tanggap terhadap bencana dan penyusunan prosedur penanganan bencana. BPBD mempunyai agenda dan prioritas pelayanan serta mengembangkan program-program yang diperuntukkan untuk kebutuhan dan menumbuhkan rasa aman bagi masyarakat. Dikuatkan juga dengan Rencana Strategis yang dirancang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2017-2022 dengan mensinergikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Rencana Strategis pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah diharapkan mampu meningkatkan kinerja BPBD dalam memberikan pelayanan. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD Kab. Tanjung Jabung Barat Bapak Drs. Zulfikri, M.AP. pada hari Kamis 06 Januari 2022. Beliau mengatakan bahwa, “Badan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas dan peran utama dalam menangani bencana baik sebelum maupun sesudah bencana termasuk menetapkan pedoman dan arahan penanggulangan bencana, menyusun, dan menetapkan serta memberitahukan peta rawan bencana, menyusun dan menetapkan prosedur tetap, melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang, barang serta bertanggung jawab atas anggaran yang digunakan.

Penulis juga mewawancarai Kepala Sub Bagian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bapak Syaiful Anwar, SH. Pada 11 Januari 2022. Beliau mengatakan bahwa, “untuk mengurangi resiko terjadinya kebakaran hutan yang pertama kali team kita lakukan ialah sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan membakar. Yang kedua kita mengedukasi masyarakat mengenai bahaya mengenai ketika masyarakat membakar lahan ketika ingin membuka lahan perkebunan. Kemudian kita juga mengukasi masyarakat tentang teknologi tepat guna tentang bagaimana cara membuka lahan perkebunan dengan cara tidak membakar”. Berdasarkan dengan wawancara diatas dapat diartikan bahwa secara keseluruhan sudah sangat dipersiapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana dalam mengantisipasi bencana yang belum ataupun yang telah terjadi.

4. Responsibilitas

Mengukur kecocokan pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang telah dilakukan apakah sesuai dengan kebijakan organisasi dan prinsip administrasi yang benar. BPBD

Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menentukan standar berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang semakin menguatkan semua kegiatan akan berjalan sesuai dengan kesesuaian program dengan prosedur dan kecakapan anggota dalam mitigasi bencana kebakaran hutan yang berlaku.

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Drs. Zulfikri, M.AP selaku Kepala Pelaksana BPBD Tanjung Jabung Barat pada Tanggal 06 Januari 2022, beliau mengatakan bahwa, “Dalam melakukan tugas, termasuk dalam hal mitigasi kebakaran hutan kami sudah sesuai dengan SOP sehingga sudah tidak ada lagi penanganan kegiatan yang tumpang tindih, tiap-tiap pelaksanaan sudah dikuasai personel mulai dari tim TRC meneruskan kepada BPBD hingga penanganan bencana dilaksanakan berdasarkan tupoksi masing-masing. Saat ini personel kami sudah dibekali dengan pengetahuan akan SOP. Segala sesuatu yang dikerjakan BPBD dalam menjalankan tugasnya selalu bersinngungan dengan masyarakat, tidak boleh dilakukan sesuka hati karena semua ada aturannya dan pihak kepolisian dan tni yang terlibat juga sedikit terbantu”.

Salah seorang masyarakat di perkebunan di Desa Muntialo padahari Tanggal 16 Januari 2022, Bapak Ade juga menambahkan bahwa, “Sejauh ini sikap aparat BPBD sudah sangat baik dalam melakukan penanganan, mereka sudah cepat dan tanggap. Memang yang salah adalah masyarakat yang membakar tanpa hati-hati namun BPBD tetap mensosialisasikan agar tidak terjadi lagi. Dan mereka sering berpatroli bersama Polisi Hutan ataupun Tentara yang ada disekitarlahan”.

Berdasarkan pengamatan penulis dari wawancara yang telah dilakukan, bisa ditarik kesimpulan bahwasannya BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam pelaksanaan tugasnya dalam mengatur dan menangani masyarakat sudah sesuai dengan SOP yang berlaku. Dalam hal ini, guna untuk meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap Undang- undang dan peraturan daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

5. Akuntabilitas

Seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik patuh pada pejabat politik yang dipilih oleh rakyat atau ukuran yang menunjukkan penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma eksternal yang ada di masyarakat atau yang dimiliki para stakeholders. Kemudian diperlukan juga kontribusi dari masyarakat dalam melihat kinerja dari organisasi tersebut. Jadi untuk mengukur akuntabilitas kinerja BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mitigasi bencana kebakaran hutan diperlukan indikator Pertanggungjawaban BPBD & Kontrol Masyarakat untuk memastikan bahwa sudah sesuai dengan pengaturan yang seharusnya.

Dilihat dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengenai Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bahwasanya semua

pengaturan dan kebijakan yang ditelah diprogramkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengenai mitigasi bencana kebakaran hutan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana mestinya.

Sementara dari Indikator kontrol dari masyarakat dapat dilihat dari wawancara dengan masyarakat. salah satunya wawancara dengan Ibu Wili pada 1 Februari 2022, mengatakan bahwa, “BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki komunikasi yang baik dengan daerah kami. Mereka memberikan pelatihan, membuat organisasi Desa Tangguh Bencana, dan membuat saluran air & embung. Selanjutnya apabila ada kebakaran hutan kami telah bisa melakukan reaksi pertama berkat adanya organisasi Desa Tangguh Bencana di Desa kami”. Dari hal ini penulis menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah dilaksanakan dengan baik.

Faktor Penghambat Dari Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Bapak Syaiful Anwar, SH. Pada 11 Januari 2022, mengatakan bahwa, untuk kendala yang kami hadapi ketika berbicara tentang menangani kebakaran hutan ialah pertama kendala mengenai medan terjadinya kebakaran hutan. Yang kedua sumber air, dan yang ketiga minimnya kendaraan jelajah yang bisa mengakses seluruh medan. Untuk kendala pertama & ketiga itu dikarenakan lahan di daerah Tanjung Jabung Barat ialah berupa tanah gambut yang sulit diakses oleh kendaraan roda 2 atau roda 4 biasa. Perlu kendaraan khusus untuk team kami bisa sampai ketitik api berada.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan tim gabungan karhutla Bapak Adil Tarigan dari unsur TNI pada 06 Januari 2022 megatakan jug, untuk kendala yang dihadapi team gabungan karhutla ialah mengenai bahwasanya struktur tanah di sebahagian besar wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ialah jenis gambut. Dimana ketika terjadi kebakaran hutan, proses pemadaman yang dilakukan harus ekstra 2 kali lipat. Jika pada kondisi tanah biasa water bombing atau pemadaman dengan bantuan helikopter cukup efektif dilakukan tapi ini tidak mempan jika dilakukan pada tanah gambut. Pemadaman harus dilakukan 2 kali yaitu dengan pemadaman dn pendinginan.

Dengan memperhatikan paparan yang disampaikan narasumber. Bahwasanya faktor faktor penghambat non teknis yang dihadapi BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ialah kondisi medan yang sulit dijangkau & struktur tanah gambut yang mengisi sebagian lahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Adapun Hambatan teknis yang ditemukan dalam pelaksanaan tugas kegiatan, di antaranya:

- a. BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih kekurangan staf teknis maupun staf administrasi terutama di keuangan dan perencanaan, sehingga untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan yang memerlukan waktu yang singkat mengalami sedikit terhambat.
- b. Peralatan dan perlengkapan (sarana dan prasarana) kurang memadai untuk pelaksanaan tugas kebencanaan.
- c. Belum adanya gedung gudang penyimpanan peralatan penanggulangan bencana yang representative.
- d. Masih kurangnya jumlah dan rendahnya skill pegawai BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- e. Penyusunan Program dilaksanakan persektor dan tidak terpadu.
- f. Masih kurangnya antisipasi dan masih rendahnya tingkat dasar bencana.
- g. Standar teknis penanggulangan bencana masih sangat rendah.
- h. Lokasi bencana umumnya sulit dijangkau.
- i. Koordinasi antar instansi yang terlibat belum berjalan dengan baik.
- j. Kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan guna menghindari terjadinya bencana masih kurang.

Upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menangani Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi

Untuk mengatasi faktor penghambat kinerja BPBD dalam mitigasi bencana Kebakaran Hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka upaya-upaya yang bisa dilakukan antara lain:

Faktor penghambat dan upaya yang di lakukan:

1. Kurangnya sumber daya manusia
 - a. Memberikan pemahaman dan keterampilan kepada kelompok
 - b. Memberikan pelatihan mitigasi bencana dan pasca bencana
 - c. Mendampingi dalam kegiatan mitigasi
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam proses mitigasi bencana Kebakaran Hutan
 - a. Meningkatkan jumlah kuantitas sarana dan prasarana
 - b. Memberikan pelatihan kepada anggota mitigasi agar lebih profesional jika mendesak dan tidak adanya sarana dan prasarana.
 - c. Merawat sarana dan prasarana secara maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil pengamatan peneliti di lapangan mengenai Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- a. Kinerja BPBD dalam mitigasi kebakaran hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat bahwa dari segi produktivitas sudah cukup baik tapi belum optimal dikarenakan adanya masyarakat yang belum memahami peraturan terkait. Selanjutnya dari dimensi Kualitas Layanan sudah maksimal sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi BPBD. Kemudian dari dimensi Responsivitas sudah berusaha mengenali kebutuhan masyarakat dengan menyusun agenda sesuai kebutuhan dilapangan. Dari dimensi Responsibilitas pekerjaan yang dilakukan instansi terkait sudah sejalan dengan peraturan & ketentuan yang ditetapkan. Terakhir dari dimensi Akuntabilitas kinerja BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah sejalan dengan pengaturan yang seharusnya.
- b. Faktor penghambat dalam kinerja BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah Masalah teknis dan non teknis. Dari segi teknis berupa sarana prasarana yang masih terbatas dan untuk faktor non teknis berkaitan dengan pemahaman masyarakat, medan yang dilalui dan tanah di Kabupaten Tanjung Barat yang berjenis gambut.
- c. Dalam meningkatkan pelayanan mitigasi bencana, upaya yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menjalankan tugas serta fungsinya sesuai dengan sasaran pandangan dan arah yang akan dicapai sekarang maupun mendatang ialah sebagai berikut :
 - a. Memberikan pemahaman dan keterampilan kepada kelompok
 - b. Memberikan pelatihan mitigasi bencana dan pasca bencana
 - c. Mendampingi dalam kegiatan mitigasi
 - d. Meningkatkan jumlah kuantitas sarana dan prasarana
 - e. Memberikan pelatihan kepada anggota mitigasi agar lebih profesional jika mendesak dan tidak adanya sarana dan prasarana.
 - f. Merawat sarana dan prasarana dengan maksimal.

SARAN

Berikut ini beberapa saran yang penulis ajukan sebagai bahan masukan serta pertimbangan guna peningkatan kinerja BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam

mitigasi bencana Kebakaran Hutan, yaitu :

1. Untuk mengatasi hambatan yang ada saat proses mitigasi bencana oleh BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat perlu meningkatkan kemampuan aparat BPBD dan meningkatkan skill dalam pelaksanaan mitigasi bencana. Serta, perlu meningkatkan lagi sosialisasi serta komunikasi dan memaksimalkan pengawasan pada periode waktu yang tetap dan terus menerus agar masyarakat dapat lebih memahami dan menerima informasi dengan baik dalam kebencanaan agar target dan hasil yang maksimal
2. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam kinerja dari BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya, beberapa saran penulis untuk mengatasi faktor penghambat yaitu BPBD harus tetap memperhatikan sumber daya baik alam maupun manusia dengan terus menjaga lingkungan dan memberi pelatihan atau sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memahami mitigasi bencana, dan Pemerintah juga harus memperhatikan pendidikan dan keahlian dari aparat dari BPBD ini sendiri agar kurangnya sistem regulasi penanggulangan bencana dapat di tingkatkan serta meningkatkan pengawasan dalam manajemen pelaksanaan dan keuangan agar dapat meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwiyanto, Agus. 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Dwiyanto, dkk. 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Galang Printika Yogyakarta.
- Fadhli, A. 2019. *Mitigasi Bencana*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hadari, Nawawi. 2006. *Evaluasi dan manajemen kinerja di lingkungan perusahaan dan industri*. Gadjah mada University Press: Yogyakarta.
- Mangkunegara. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: PTRemaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: RemajaRosdakarya.

- Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghallia Indonesia.
- Noor, D. 2014. *Pengantar Mitigasi Bencana Geologi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Prawirosentono, Suyadi. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.
- Simamora, Henry. 1995. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bagian Yogyakarta: Penerbitan STIE YKPN.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, N. 2005. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryabrata, Sumadi. 2008. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan-Peraturan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Sumber Lain

- Dokumen Peta Risiko Bencana dan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020-2024
- <http://bpbd.tanjabbarkab.go.id/>. *Mitigasi Bencana*. Rabu, 1 September 2021.
- <http://bpbd.tanjabbarkab.go.id/>. *Tupoksi*. Minggu, 19 September 2021.
- <https://display.bmkgjambi.com/>. *Pantauan titik Hotspot Provinsi Jambi*. Minggu, 19 September 2021.
- <https://id.wikipedia.org/>. *Kabupaten Tanjung Jabung Barat* Jum'at, 24 September 2021.
- <https://jdihn.go.id/>. *Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat*. Rabu, 1

September 2021

[https://seputar-geografi-kita.blogspot.Mitigasi Kebakaran Hutan](https://seputar-geografi-kita.blogspot.Mitigasi%20Kebakaran%20Hutan). Diakses 20 september 2021.

[https://tanjabarkab.bps.go.id.Jumlah-Penduduk-Menurut-Kecamatan-Di- Kabupaten- Tanjung-Jabung-Barat-2016](https://tanjabarkab.bps.go.id.Jumlah-Penduduk-Menurut-Kecamatan-Di-Kabupaten-Tanjung-Jabung-Barat-2016). Jum'at, 24 September 2021.

[http://tanjabarkab.go.id/site/. Profil Derah](http://tanjabarkab.go.id/site/.Profil%20Derah). Minggu, 19 September 2021.

Paparan Karhutla Oleh BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat. ppt.

Prosedur Pemadaman Kebakaran Lahan Dan Hutan. Ppt.

RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021.

Dokumen Peta Risiko Bencana dan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2020-2024